

ANALYSIS OF IMMIGRATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMKIM) VERSION 2.0 FOR THE ISSUANCE OF A RESIDENCE PERMIT WITH THE COBIT 5 METHOD AT THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE TPI MAKASSAR

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN (SIMKIM) VERSI 2.0 UNTUK PENERBITAN IZIN TINGGAL DENGAN METODE COBIT 5 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR

DOI:10.52617/tematics.v3i1.303

Andi Hammam Alfarisi Akasy

Politeknik Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Email : andihammam@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Imigrasi yang membawahi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, telah mengintegrasikan seluruh fungsi Keimigrasian melalui SIMKIM sejak tahun 2007. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi demi mendukung operasional, manajemen, serta pengambilan kebijakan. Implementasi SIMKIM di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian salah satunya dengan mengoperasikan sistem tersebut dalam proses penerbitan izin tinggal bagi Orang Asing. Kedatangan Orang Asing melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan mengingat strategi kebijakan selektif (*selective policy*), hanya. Orang Asing yang dapat memberi manfaat dan tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi penggunaan SIMKIM Versi 2.0 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model COBIT 5 (*Control Objective for Information and Related Technology*), adapun sumber data digunakan yakni data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara, studi dokumen maupun observasi. Landasan teori yang digunakan adalah teori informasi teknologi, sistem informasi manajemen, pelayanan publik dan tata kelola teknologi informasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal proses penerbitan izin tinggal menggunakan SIMKIM Versi 2.0 masih ditemukan beragam kendala baik dari kesisteman maupun secara fasilitas dan implementasi tata kelola teknologi informasi dengan cara mengukur tingkat kematangan *maturity level*.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), Izin Tinggal, Keimigrasian, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

Abstract

Along with the advancement of information technology, the Directorate General of Immigration has integrated all immigration functions through SIMKIM since 2007. Immigration Management Information System (SIMKIM) is a system used to collect, process and convey information to support operations, management, and policy making. Simkim implementation in the Immigration Technical Implementation Unit is one of them by operating the system in the process of issuing residence permits to Foreigners. The arrival of Foreigners through immigration checkpoints by remembering selective policy strategies, only foreigners who can benefit and do not interfere with the security or order of the public can enter and live in the Territory of Indonesia. The purpose of this study is to analyze the implementation of simkim version 2.0 use at TPI Makassar Class I Immigration Office. This research uses qualitative descriptive methods with the COBIT 5 (Control Objective for Information and Related Technology) model, while the data source is used namely primary and secondary data obtained by interview, document study and observation. The theoretical

foundations used are information technology theory, management information systems, public service and information technology governance. Based on the analysis of data conducted, it was concluded that in terms of the process of issuing residence permits using SIMKIM Version 2.0 there are still various obstacles both from the system and in terms of facilities and implementation of information technology governance by measuring maturity level maturity level.

Keywords: Immigration Management Information System (SIMKIM), Residence Permit, Immigration, Directorate General of Immigration



1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi seiring dengan inovasi yang dilahirkan oleh manusia sebagai pengguna teknologi informasi tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini menjadikan manusia sangat terbantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara diberikan kemudahan fasilitas secara langsung yang dapat digunakan dengan teknologi tersebut[1]. Sehingga dalam perkembangannya akan berdampak positif terhadap aktivitas organisasi. Pengaruh positif dari perkembangan teknologi informasi tersebut, memacu organisasi khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengakomodir nilai "PASTI". Nilai PASTI yang dimaksud disini adalah „Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam hal pengumpulan data yang akurat, tepat, dan aktual. Informasi juga merupakan faktor penting dalam menyusun strategi demi pencapaian visi sebuah organisasi pemerintah, baik dalam hal perencanaan maupun monitoring[2]. Dalam hal pengambilan keputusan manajemen informasi, didasarkan pada pengumpulan data kemudian data tersebut diolah dan diproses sehingga menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Demikian juga informasi dibutuhkan sangat berperan penting bagi sumber daya manusia dalam melakukan operasional kerjanya. Oleh sebab itu penyajian informasi berupa data yang akurat menjadi faktor meningkatkan produktivitas kinerja dalam suatu organisasi, menjadi tolak ukur terhadap kemajuan organisasi, khususnya dalam instansi

pemerintahan yang menyediakan pelayanan publik[3].

Perkembangan inovasi teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas, yang dimaksud kualitas di sini teknologi kesisteman semakin berkembang sesuai kebutuhan dan kuantitas yang dimaksudkan di sini jumlah izin tinggal khususnya penerbitan bagi Warga Negara Asing akan bertambah setiap tahunnya, yang berdampak nyata pada kinerja pelayanan terhadap masyarakat dan penegakan hukum di bidang Keimigrasian melalui pengaruh teknologi informasi pada seluruh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Keimigrasian terkecuali satu tahun terakhir lebih kurang periode maret 2020 sampai sekarang ini disebabkan munculnya pandemi covid-19 yang berakibat menurunnya kuantitas penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing.

Pada pelaksanaan tugas dan wewenang Keimigrasian terkait pelayanan atau penegakan hukum, semua dapat difasilitasi dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terpusat di Direktorat Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan terhubung ke Pusat Data Keimigrasian (PUSDAKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam pengaplikasiannya khususnya bagi penerbitan izin tinggal bagi Warga Negara Asing menggunakan SIMKIM Versi 2.0 tepatnya di tahun 2019, yang merupakan pengembangan dari SIMKIM Versi 1.0. Perbedaan SIMKIM Versi 1.0 dengan SIMKIM Versi 2.0 terdapat dalam fitur, jaringan, hardware, juga terdapat perubahan dalam hal software. Selain itu, pengaruh sumber daya manusia yang mengoperasikan, sarana dan prasarana memadai serta kebijakan pimpinan dalam mendukung perkembangan penyempurnaan SIMKIM.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan untuk menghimpun, mengolah dan mengemukakan informasi, serta sebagai penentuan keputusan dalam menjalankan fungsi Keimigrasian[4]. Target yang diharapkan dengan dibentuknya SIMKIM ini yakni, untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan guna menghasilkan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. Memberikan pelayanan prima, menjaga kerja sama antara instansi terkait dalam hal fasilitasi kebutuhan informasi data Keimigrasian dan membantu untuk memaksimalkan beserta pegawai kinerja pegawai.

Pada tahun 2007 Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian diterapkan pertama kali, kemudian berkembang hingga saat ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kebutuhan organisasi guna penyempurnaan SIMKIM dan pengoptimalisasian pelayanan yang maksimal secara efektif serta profesional. SIMKIM dapat mengintegrasikan semua fungsi Keimigrasian tersebut dengan baik, yang menjadikan kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi semakin optimal. Sebuah sistem informasi manajemen yang layak, SIMKIM dapat mengumpulkan dan menyimpan data dengan pengamanan optimal dalam pusat data Keimigrasian, serta diamankan dengan bantuan *Disaster Recovery Center (DRC)*. Selain mengumpulkan data dan menyimpannya, SIMKIM juga dapat menarik data tersebut kembali dan dapat diakses oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi maupun instansi terkait[5].

Kedatangan Orang Asing ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi

(TPI) yang langsung melaporkan keberadaan atau izin tinggal mereka selama berada di Indonesia yang disesuaikan dengan tempat dimana Orang Asing tersebut bekerja dan kemudian melaporkannya ke Kantor Imigrasi. Pada kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung nilai hak asasi manusia, mengatur masuk dan keluar, keberadaan, serta kegiatan Orang Asing yang harus sesuai dengan kepentingan dan tujuan[6]. Mengingat strategi kebijakan yang dimaksud dalam menjamin kepentingan umum, hanya kepada Orang Asing yang dapat memberi manfaat dan tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban masyarakat yang dapat masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Pemberlakuan kebijakan baru tak terlepas untuk memberikan kemudahan yang akan dirasakan oleh setiap orang dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi berbasis digital, yang diiringi kemampuan sumber daya manusia untuk mengoperasikannya[7], didukung pula dengan sarana prasarana serta anggaran yang memadai guna peningkatan pelayanan, khususnya pelayanan izin tinggal.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan suatu entitas, berperan dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian dititikberatkan pada penerbitan izin tinggal untuk Orang Asing. Dikatakan demikian sebab terkait pelaksanaan tugas, merupakan tanggung jawab Kantor Imigrasi yang akan dilaporkan secara berkala kepada Kantor Wilayah berupa data pemohon Orang Asing. Berdasarkan pernyataan di atas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sudah seyogyanya memperhatikan seluruh aspek yang mendukung kegiatan pelaksanaan fungsi Keimigrasian, baik dari segi pelayanan publik, keamanan serta pengembangan kesisteman khususnya perkembangan SIMKIM Versi 1.0 menjadi Versi 2.0.

Merujuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pasal 23 ayat 4 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan bahwa “Penyelenggara memiliki kewajiban dalam mengelola Sistem Informasi pada Sistem Informasi Elektronik atau Non Elektronik yang sekurang-kurangnya yang mencakup profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penelitian kinerja”[8].

Hal ini berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah menerapkan pembaharuan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Versi 1.0 menjadi Versi 2.0 sebagai bagian dari pelayanan publik Keimigrasian. Dengan mengimplementasikan SIMKIM Versi 2.0 ini, fungsi Keimigrasian terkait penerbitan izin tinggal Warga Negara Asing telah terintegrasi pada semua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian, Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri telah terealisasi pengoperasiannya.

Proses penerbitan izin tinggal menggunakan SIMKIM Versi 2.0 masih terdapat kendala dalam kesistemannya. Pertama, penarikan data tidak dapat diklasifikasikan secara terperinci menurut kewarganegaraan, jenis izin tinggal, tujuan kedatangan, jenis kelamin, bidang pekerjaan, dan domisili tempat tinggal. Kedua, data pemegang izin tinggal tetap yang masih tersimpan di SIMKIM Versi 1.0 agar bisa diintegrasikan ke SIMKIM Versi 2.0 untuk memudahkan dalam proses pencarian data. Ketiga, *QR code* pada Kitas online dan billing

pembayaran tidak dapat diakses menggunakan perangkat pemindai, yang menyebabkan penginputan permohonan menggunakan Niora tidak terupdate domisili pemohon yang bersangkutan sehingga harus diedit melalui perawatan data.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) yakni :

1. Sejauh mana implementasi SIMKIM Versi 2.0 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam penerbitan izin tinggal Orang Asing ?
2. Bagaimana implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan metode COBIT 5 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar ?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, didapatkan tujuan penelitian yang maksud oleh penulis sebagai berikut :

1. Menjelaskan implementasi SIMKIM Versi 2.0 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam penerbitan izin tinggal Orang Asing.
2. Menjelaskan implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan metode Cobit 5 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Manfaat

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
Merupakan bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Baik itu, sebagai bahan dasar atau bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan rumusan penelitian ini. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bidang Keimigrasian.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar sebagai bahan masukan terkait tata kelola teknologi informasi yang menggunakan metode Cobit 5.
 - b. Bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, memberikan masukan dalam pengembangan SIMKIM Versi 2.0 khususnya penerbitan izin tinggal untuk meningkatkan pelayanan Keimigrasian.

LANDASAN TEORI

A. Teori / Peraturan Yang Digunakan

Adapun dasar hukum mengenai penulisan Karya tulis ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- c. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- d. Kepdir Jenderal Imigrasi Nomor IMI.895.TI.01.01 Tahun 2013

B. Landasan Teori

Teori Informasi Teknologi

Information and communication technology (ICT) dalam bahasa Inggris merupakan sebutan dari teknologi informasi dan komunikasi. Arti dari kata teknologi informasi dan komunikasi didefinisikan secara umum adalah semua kemajuan teknologi yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, pengoperasian, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran

data[9]. Sudut pandang teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua perpaduan yang tidak dapat dipisahkan yakni teknologi informasi beserta teknologi komunikasi. Teknologi informasi merangkul semua hal-hal yang berkaitan dengan interaksi, penggunaan teknologi informasi sebagai alat yang membantu dalam memudahkan kegiatan manusia, manipulasi dan pengelolaan sumber data. Sementara itu, teknologi komunikasi bersinggungan dengan pemanfaatan perangkat untuk menjalankan dan memindahkan informasi dari perangkat satu ke perangkat yang lain[10].

Ananta Sannai menggambarkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi media yang digunakan untuk membantu memperoleh informasi antara individu kepada individu lainnya. Melalui Kementerian Riset dan Teknologi menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai komponen ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara keseluruhan merupakan semua perihal teknologi yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan penyebaran informasi berupa data[11].

Seiring dengan tanggapan tersebut, Moh. Arif H. Ismail dan Isjoni berpandangan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah kombinasi dari serangkaian teknologi khususnya mikroelektronik komputer, teknologi komunikasi yang mendukung metode penyimpanan berupa data, penyampaian, pemrosesan, dan penyajian informasi data melalui bermacam-macam media termasuk teks, suara, ilustrasi, gambar, dan video. Sementara teori lain yang dikemukakan oleh Zaidatun menyebutkan bahwa sebuah teknologi informasi dan komunikasi adalah metode hubungan cerdas yang dijalankan oleh komputer untuk menyimpan dan menyalurkan teks, aktivitas beserta rangkaian data[12]. Berdasarkan definisi ini, teknologi

informasi dan komunikasi dicirikan yaitu semua kemajuan teknologi ataupun perangkat yang dalam upaya yang bertujuan membantu mengoptimalkan penyajian informasi terhadap orang lain.

Teori Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu pola yang berbasis komputer, bermanfaat dalam menyimpan data untuk setiap pengguna demi memaksimalkan fungsi manajemen dengan memberikan pengaruh dalam penentuan keputusan. Suatu jaringan informasi ini diperlukan seorang pimpinan ketika melaksanakan tugasnya, terutama saat mengambil sebuah keputusan bijak merupakan definisi sistem informasi manajemen yang diutarakan oleh Ibnu Syamsi. Sedangkan menurut Zulkifli Amsyah mengutarakan sistem informasi manajemen menggambarkan usaha untuk mengawasi aktivitas kegiatan informasi dengan memanfaatkan pendekatan sistem yang berlandaskan pada prinsip manajemen[13]. Sistem informasi manajemen sudah pernah diimplementasikan oleh para pemimpin organisasi dalam upaya penentuan keputusan meskipun masih terbatas. Pada saat ini, proses penentuan keputusan dinilai masih sangat sederhana. Semuanya masih dijalankan oleh manusia secara manual dan terbilang lambat sebab semua informasi disimpan dalam bentuk lembaran pengarsipan. Sehingga ketika pimpinan membutuhkan suatu informasi berupa data konkrit berhubungan dengan pengambilan kebijakan, maka tidak ada upaya melainkan membongkar seluruh dokumenarsip yang diperlukan[14]. Sistem informasi manajemen dapat dikatakan juga sebagai implementasi sebuah sistem

informasi dalam organisasi untuk memaksimalkan informasi, mendukung terlaksananya kegiatan, dan tujuan oleh seluruh tingkatan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian.

Teori Pelayanan Publik

Sebutan kata “layan”bermakna yakni sebuah pelayanan yang bermaksud membantu mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan dari orang lain untuk melakukan kegiatan dalam melayani. Atas dasar bahwa setiap individu memerlukan pelayanan, terlebih dalam batas tertentu dapat disebutkan bahwa pelayanan ini tidak dapat terpisahkan dari aktivitas individu maupun kelompok[15]. Kemudian sebutan istilah “publik” dari kata *public* yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti umum, masyarakat, dan negara.

Beberapa ahli yang memberikan pemahaman tentang pelayanan publik termasuk juga Agung Kurniawan, menuturkan bahwa pengaturan administrasi (melayani) patut untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok yang berkepentingan dengan organisasi sesuai dengan hukum, prinsip, dan strategi yang signifikan. Menurut Sinambela pelayanan publik merupakan semua gerakan yang diterapkan oleh Badan Pemerintah dalam setiap tindakan bermakna membantu suatu perkumpulan atau kesatuan, dan menawarkan pemenuhan kepuasan sekalipun pada kenyataan hasilnya yang tidak melekat atas produk yang sebenarnya[16].

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah dan diselesaikan oleh organisasi pemerintah, baik di daerah, di pusat, dan di dalam ranah wilayah Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik terhadap daerah setempat merupakan kewajiban ataupun unsur utama pemerintah dalam menyelesaikan fungsi legislatifnya[17]. Pelayanan publik adalah komponen vital dalam organisasi pemerintah karena mencakup sebagian besar kehidupan. Organisasi pelayanan publik adalah upaya

Negara untuk memenuhi persyaratan dasar, kesetaraan sosial bagi semua penduduk dalam mendapatkan hakdan kebutuhannya beserta pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik[18].

Teori Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola merupakan sistem yang berbentuk rangkaian proses, pedoman dan kebijakan yang mengarahkan pengendalian suatu kegiatan dalam perusahaan maupun instansi[19]. Jadi yang dimaksud tata kelola teknologi informasi adalah komponen terkoordinasi dari penyelenggaraan suatu organisasi yang menggabungkan kepemimpinan, pola informasi, dan prosesnya. Situasi ini untuk menjamin inovasi teknologi informasi organisasi berhasil diimplementasikan demi menjaga dan memaksimalkan kebijakan dan target organisasi. Tata kelola teknologi informasi mengintegrasikan sistem informasi, teknologi dan komunikasi, bidang usaha, peraturan bisnis, dan berbagai permasalahan yang lain menyangkut semua mitra usaha.

Pendapat Gartner, tatakelola teknologi informasi dicirikan sebagai metode yang menegaskan penerapan pada teknologi informasi yang efektif sepanjang memaksimalkan organisasi untuk mencapai targetnya. Tata kelola permintaan teknologi informasi merupakan siklus yang dijalankan organisasi demi menjamin penilaian, penetapan, prioritas, bersama pendanaan investasi teknologi informasi yang bersaing secara memadai, mengawasi pelaksanaannya, dan memusatkan manfaat bisnis yang dapat diukur. Tata kelola teknologi informasi merupakan gagasan yang terpaku pada bagian atau bidang teknologi yang menyampaikan nilai bisnis bagi organisasi. Hal tersebut merupakan sekumpulan peraturan, pedoman, dan pengaturan yang menjadi ciri dan menjamin aktivitas

yang kuat, terkontrol, dan signifikan dari bagian teknologi informasi. Ini juga memberikan teknik untuk mengenali dan menilai pelaksanaan teknologi informasi beserta bagaimana cara mengidentifikasi dengan perkembangan bisnis. Sementara dengan melaksanakan prosedur rancangan tata kelola teknologi informasi seperti Cobit, di mana organisasi yang dapat mematuhi persyaratan peraturan beserta mengurangi resiko bisnis teknologi informasi dengan mencapai manfaat bisnis yang diukur. Tata kelola informasi teknologi memakai, mengawasi, memajukan teknologi untuk membantu, melengkapi, atau memberdayakan organisasi untuk mencapai targetnya.



Gambar Tata Kelola Teknologi Informasi

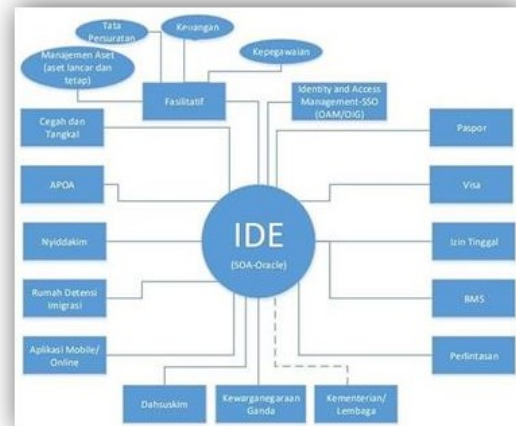
Definisi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Pada tanggal 29 April 2019 lalu sudah di rilis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian versi kedua. Hal ini menunjukkan suatu upaya peningkatan pelayanan secara internal dari Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian ialah sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi demi mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan kebijakan dalam merealisasikan fungsi Keimigrasian[20].

Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian bertanggung jawab membangun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) menjadi sarana implementasi fungsi Keimigrasian di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian bisa terakses oleh instansi maupun organisasi pemerintahan berdasarkan dengan tugas dan kapasitasnya. SIMKIM selaku instrumen bertujuan meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan pelaksanaan kinerja Keimigrasian. Alat utama yang dipergunakan adalah sistem Keimigrasian berdasarkan pada teknologi informasi dan komunikasi dengan memenuhi aspek kecepatan, keakuratan, dan efektif. Pada prinsipnya, sistem informasi manajemen berkenaan atas eksploitasi dan penggunaan informasi. Sistem informasi manajemen dapat menyederhanakan kinerja para pegawai dalam organisasi.

Aplikasi SIMKIM Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar akan menunjang dalam manajemen, operasional dan merealisasikan fungsi Keimigrasian. Demikian, SIMKIM yang dipilih karena dapat menyesuaikan dengan tugas dan wewenang Keimigrasian. Tugas dan wewenang Keimigrasian, yaitu melakukan perumusan dan kebijakan di bidang Keimigrasian khususnya Informasi dan Teknologi Keimigrasian, Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Implementasi SIMKIM dimulai dari mengkaji operasional kebijakan dengan memanfaatkan media pada teknologi informasi, menyelaraskan rancangan konsep dengan kebutuhan organisasi, dan melaksanakan penerapannya. Kehadiran SIMKIM berhasil mewujudkan sesuatu

informasi dalam bentuk data Keimigrasian sesuai regulasi yang terintegrasi dengan baik.



Gambar Alur SIMKIM Versi 2.0

Definisi Izin Tinggal Keimigrasian

Salah satu instrumen penting pelayanan Keimigrasian kepada Orang Asing adalah izin Keimigrasian. Izin Keimigrasian bagi orang asing dalam bentuk visa dan penerapan tanda masuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi[21]. Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditetapkan, bahwa setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia harus memiliki izin Keimigrasian. Izin Keimigrasian adalah keterangan keberadaan yang sah untuk setiap Orang Asing di wilayah Indonesia[22]. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, bisnis maupun liburan.

Definisi E- Government

E-Government secara umum cenderung dicirikan sebagai pemanfaatan inovasi berbasis komputer untuk mengubah pelaksanaan pemerintahan, yang berarti meningkatkan kecukupan, produktivitas, penyampaian data, dan penyampaian administrasi[23]. Istilah *e-government* menyinggung pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah untuk membuat

institusi ini lebih menarik dan transparan[24]. Menurut Hartono, *e-government* adalah suatu metode sistem pemerintahan yang menggunakan *ICT (Information, Communication and Technology)* menjadi metode yang memudahkan saat bekerja dan tindakan negosiasi bisnis untuk penduduk, lembaga bisnis, kantor pemerintah dan stafnya[25].

Dengan diterapkan *e-government* maka tujuan organisasi pemerintah agar transparansi dan tanggung jawab pelayanan publik kepada warganya dapat terlaksana. Dengan adanya *e-government output* dari pelayanan terhadap masyarakat bisa membaik, kondisi internal lembaga pemerintahan semakin solid, memacu sumber daya manusia agar berkembang mengikuti teknologi informasi serta akses masyarakat untuk informasi yang berkaitan dengan pemerintahan semakin mudah diperoleh[26].

Definisi Metode Cobit 5

Control Objective for Information and Related Technology atau biasa disebut dengan metode COBIT 5 adalah konteks kerja yang dibuat untuk manajemen informasi teknologi dan informasi teknologi pemerintahan sebagai instrumen penunjang yang memungkinkan manajer untuk mengatasi setiap permasalahan antara kepentingan pengawasan, masalah bersifat teknis, dan peluang bisnis[27]. Cobit 5 adalah aturan dalam tata kelola teknologi informasi dimana aturan ini menggerakkan manajemen, menggunakan teknologi informasi sebagai bentuk dari pelayanan, kontrol, pemeriksaan, dan segala sesuatu yang diidentifikasi dengan prosedur bisnis dalam pengimplementasian teknologi informasi. Berdasarkan hal

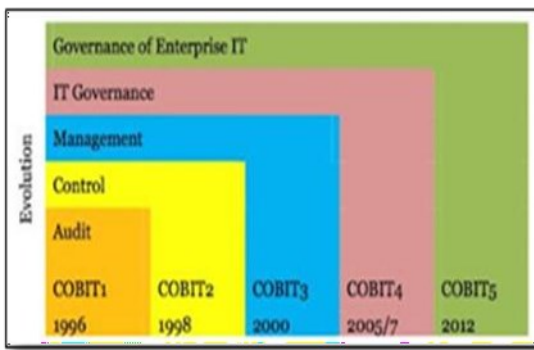
tersebut, tata kelola teknologi informasi memberikan keuntungan bagi organisasi untuk eksploitasi data, dan juga menjadi penggerak administrasi organisasi[28].

Di tahun 1996, pertamakalinya mendengar dan mengenal istilah terkait Cobit. Dengan tujuan utamanya yaitu “untuk mengkaji, menguraikan, memperbaharui, mempublikasikan kewenangan, dan menetapkan aturan umum untuk mengendalikan teknologi informasi dalam penggunaan Cobit sehari-hari oleh para manajer”. Keuntungan yang diperoleh dari seorang manajer, auditor, dan pengguna Cobit yaitu membantu mereka dalam menginterpretasikan sistem teknologi informasi serta menyelesaikan permasalahan pengawasan keamanan untuk melindungi aset institusi melalui pengembangan model tata kelola teknologi informasi.

Bermula di tahun 1996, munculnya Cobit versi 1 dengan rancangan kerja yang membahas terkait audit sistem. Seiring dengan perkembangan Cobit versi 2 pun (pengendalian). Berlanjut sekitar pada tahun 2000 Cobit mengalami perkembangan lagi menjadi bentuk versi 3 dengan aturan kerja yang menjurus terkait pembahasan area manajemen. Ruang lingkup *Information Technology Governance* yang luas jangkauannya di organisasi menjadi pembahasan penting bagi perubahan *framework* Cobit pada versi 4.0 dan 4.1 yang diluncurkan pada tahun 2005. Namun demikian, pertimbangan data yang cukup lama hingga saat ini perkembangan Cobit menerbitkan versi 5 sebagai versi terakhir yang memiliki jangkauan lebih luas dari sebelumnya.

Metode Cobit memungkinkan organisasi melaksanakan pengoperasian data teknologi informasi secara efektif dan pada dasarnya layak diterapkan semua organisasi. Bagian model manajemen Cobit yang memuat sebuah sistem kerangka kerja untuk

memenuhi kebutuhan manajemen dalam pengelolaan teknologi informasi. Beberapa manfaat kerangka kerja dengan menggunakan pemilihan metode Cobit diantaranya gagasan yang sesuai dengan tujuan organisasi, memiliki konsep yang lengkap, memiliki definisi hubungan yang kuat, hingga menjadi sesuatu yang dapat memudahkan untuk mengarahkan organisasi, dari persoalan teknis ke sasaran target organisasi dan sebaliknya diharapkan bisa memecahkan masalah dari lingkup yang sangat besar hingga yang lebih spesifik[29].



Gambar Evolusi COBIT

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan kali ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berlandaskan pada fakta yang sebenarnya atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif mencoba menggambarkan maupun mendeskripsikan seluruh keadaan gejala yang ada saat ini pada penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara bersama pejabat struktural Kantor Imigrasi ini tentang kendala SIMKIM Versi 2.0 yang ada saat ini, kemudian melakukan pengkajian penerapan,

dan mencari data dukung mengenai kinerja pelayanan melalui SIMKIM Versi 2.0 terbaru dalam penerbitan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para pejabat struktural dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Alur penerbitan izin tinggal, catatan jumlah pemohon izin tinggal, kendala SIMKIM 2.0, dampak sebelum dan sesudah ada SIMKIM Versi 2.0 dalam pelayanan Keimigrasian Kantor Imigrasi ini serta peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pimpinan, arsip penerbitan izin tinggal, jurnal atakarya ilmiah yang berhubungan dengan aplikasi SIMKIM Versi 2.0, dan data pendukung yang lain selama penelitian berlangsung.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dilaksanakan dengan maksud untuk menanganisetiap tanggapan atas pernyataan dari responden sehingga mendapatkan keakuratan data. Sedangkan analisis data dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu, metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan informasi yang bisa diukur dan dilakukan dengan cepat, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memproses informasi berbentuk dalam catatan-catatan yang menumpuk dan akan sangat banyak yang mengakibatkan hal ini memerlukan opsi waktu untuk dapat berhasil menjabarkannya dengan seksama. Namun pada penelitian ini, penulis memakai metode analisis kualitatif sebab tata cara yang digunakan dengan mengumpulkan data dengan bertatap muka secara langsung dan berinteraksi bersama individu maupun kelompok di lokasi penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Versi 2.0 Terhadap Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Perlu diketahui bahwa pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian atau SIMKIM sejak tahun 2007 sudah berlaku hampir di seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Keimigrasian di Indonesia maupun pada perwakilan RI. Salah satu UPT yang menerapkan pemanfaatan SIMKIM adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dan bentuk pemanfaatan SIMKIM di Kanim salah satunya adalah penerapan penggunaan SIMKIM Versi 2.0 dalam penerbitan izin tinggal.

Di dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Keimigrasian dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI.895.TI.01.01 Tahun 2013 Tentang Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Yang Dapat Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dalam Melaksanakan Fungsi Keimigrasian telah dijelaskan bahwa tujuan dari diterapkannya SIMKIM adalah untuk mengintegrasikan seluruh fungsi Keimigrasian baik dari aspek pelayanan, penegakan hukum maupun pengawasan. Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing yang berkeinginan menetap di wilayah Indonesia dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan adanya SIMKIM di Kanim (Kantor Imigrasi) memungkinkan proses penerbitan serta perpanjangan izin tinggal berjalan lebih cepat dan terstruktur dengan semua proses dioperasikan secara *by sistem*. Maka petugas Imigrasi dapat memanfaatkan keberadaan SIMKIM dalam melakukan tugasnya tanpa mengabaikan nalurnya sebagai petugas pemeriksa dan pengawas Keimigrasian. Berikut merupakan gambaran penggelaran SIMKIM

Direktorat Jenderal Imigrasi :



Penggelaran SIMKIM Versi 1.0



Penggelaran SIMKIM Versi 2.0

Dari penjabaran kedua gambar di atas, dapat dijabarkan bahwa pengaruh SIMKIM terkait pelaksanaan fungsi Keimigrasian sangat vital dikarenakan di dalam pengembangan SIMKIM Versi 1.0 menjadi Versi 2.0 mempunyai tujuan untuk memajukan manajemen Keimigrasian dalam merumuskan kebijakan bersifat teknis, merealisasikan teknis dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Aktualisasi SIMKIM membawa dampak perubahan pola kerja dalam menyelesaikan operasional kerja di bidang Imigrasi. Penggunaan SIMKIM yang dahulunya secara manual, kini sudah terkomputerisasi dan berbasis *online*.

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dari masa ke masa

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, fungsi penyelenggara pengembangan sistem informasi Keimigrasian merupakan salah satu fungsi dari Subdirektorat Perencanaan d1a2n

dan Teknologi Informasi Keimigrasian[30].

Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi[31].

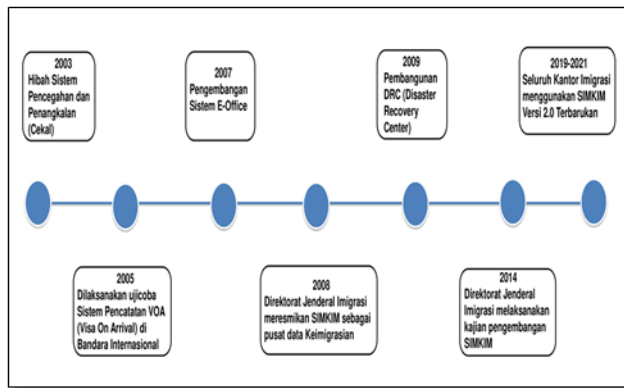
Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) merupakan fasilitas utama dalam pelayanan publik untuk menjalankan tugas dan fungsi Keimigrasian. Kajian awal perkembangan SIMKIM terjadi pada periode tahun 2002 dengan bentuk SIMKIM Versi 1.0 yang bertujuan mengkoordinasikan pelayanan Keimigrasian. Akan tetapi, pengembangan SIMKIM tahun tersebut belum terlaksana secara utuh sebab terkendala minimnya anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun baru pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Imigrasi melangsungkan kerjasama dengan Negara Australia berupa hibah sistem pencegahan dan penangkalan (Cekal) serta merupakan sistem pertama yang berhasil terkoneksi dengan SIMKIM.

Berbekal sukses dengan sistem sebelumnya, tahun 2005 mulai dilakukan uji coba sistem pencatatan *VOA (Visa On Arrival)* di Bandara Internasional salah satunya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Setahun kemudian Direktorat Jenderal Imigrasi kembali meluaskan layanan Keimigrasian dengan menghadirkan SPTBB (Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik). Penggunaan sistem ini adalah pengambilan foto wajah dan sidik jari pemohon SPRI serta berfungsi juga untuk membantu dalam hal pencegahan

2007 Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan sistem *e-office* dengan target berfokus pada layanan Keimigrasian baik di Pusat yaitu SISTIK (Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian) maupun di UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kantor Imigrasi yang tersebar di Nusantara. Dengan sistem *e-office* ini seluruh penyelenggaraan data Keimigrasian dapat tersip secara akurat.

Berlanjut pada tahun 2008 pihak Direktorat Jenderal Imigrasi meresmikan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) menjadi pusat data Keimigrasian, selain itu juga mengembangkan sistem penerbitan paspor RI menggantikan SPTBB atau biasa disebut sistem photo terpadu berbasis biometrik. Untuk sistem penerbitan paspor RI (SPRI), *ECS (Enterprise Cekal Sistem)* dan *PMS (Passenger Movement Sistem)* dalam SIMKIM sejauh ini berjalan baik serta telah dilaksanakan pengujian di beberapa TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Untuk tujuan terus meningkatkan kapasitas kemampuan SIMKIM, pada tahun 2009 dibangun *DRC (Disaster Recovery Centre)* dengan fungsi jika dikemudian hari mengalami kendala dapat berperan sebagai *backup* data di PUSDAKIM (Pusat Data Keimigrasian).

Di tahun 2014 Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan evaluasi terhadap pengembangan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian). Setelah melalui tahapan pengkajian ulang dengan maksud penyempurnaan pembaruan SIMKIM dalam hal kesisteman, pada tanggal 29 April 2019 seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia mulai mengimplementasikan penggunaan SIMKIM terbaru Versi 2.0 dan berlanjut sampai saat ini.



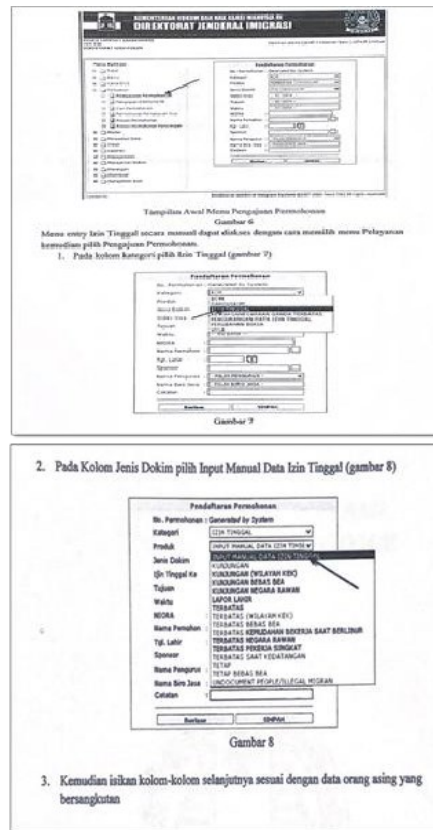
Gambar Perkembangan SIMKIM Masa ke Masa

Proses Penerbitan Izin Tinggal Orang Asing Menggunakan SIMKIM Versi 2.0 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Sistem berbasis TI (Teknologi Informasi) yang diterapkan di berbagai institusi merupakan komponen utama yang menjadi tujuan dalam mencapai keberhasilan. Dengan bersama-sama membangun komunikasi dan interaksi memanfaatkan kemudahan sistem yang tersedia demi mewujudkan hasil kerja maksimal[32]. Peran sebuah sistem menjelma sangat krusial karena sudah banyak institusi menjalankan pelayanan secara *by sistem* dengan manusia sebagai user yang mengawasi. Implementasi teknologi informasi memiliki target untuk mendukung kebutuhan organisasi, selain itu untuk memecahkan problem, menciptakan inovasi cemerlang dan meningkatkan efektivitas kegiatan pekerjaan[33].

Direktorat Jenderal Imigrasi tak henti-hentinya melakukan berbagai perkembangan teknologi, salah satunya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan mengimplementasikan kemudahan layanan penerbitan izin tinggal Keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi melalui sebuah sistem SIMKIM Versi 2.0 terbaru.

Berikut merupakan alur penggunaan aplikasi SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) dalam penerbitan izin tinggal bagi pemegang paspor berkewarganegaraan Asing :



Gambar Alur Input Izin Tinggal

Hasil wawancara penulis kepada salah satu petugas di loket pelayanan izin tinggal Seksi Intaltuskim (Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, menurut Ibu Camelia Kinas untuk proses penerbitan izin tinggal Orang Asing menggunakan SIMKIM Versi 2.0 metode kerja aplikasi tersebut cukup simple. Diawali dengan menyalakan CPU (*Central Processing Unit*), kemudian terkoneksi sistem yang ada Direktorat SISITIK dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Langkah pertama yg dilakukan yaitu masukan *login* dengan data NIP (Nomor Induk Pegawai) dan langkah kedua memasukkan *password* dari petugas, otomatis akan langsung masuk diaplikasinya.

Tahapan yang dilakukan pada saat mengaktifkan SIMKIM Versi 2.0 tidak jauh beda dengan SIMKIM Versi 1.0, perbedaannya terletak dari tampilan sistem dan fitur dilayar monitor. Jadi user setiap Kantor Imigrasi hanya tinggal masuk ke aplikasi SIMKIM yang sudah tersedia dalam sistem kemudian *login* sesuai kapasitas dan melanjutkan permohonan. Menu *entry* izin tinggal secara manual dapat diakses dengan cara memilih menu pelayanan kemudian pilih pengajuan permohonan. Pada kolom kategori pilih izin tinggal, lalu kolom jenis dokumen Keimigrasian pilih input data izintinggal. Isikan kolom sesuai dengan data Orang Asing yang bersangkutan berdasarkan nama dan nomor paspor kebangsaan.

Berikut prosedur dalam penerbitan izin tinggal Keimigrasian WNA (Warga Negara Asing) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar :



Gambar Prosedur Izin Tinggal Keimigrasian

Dampak positif dengan hadirnya SIMKIM Versi 2.0 mengacu pada kesisteman yakni memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan jasa Keimigrasian. Selain itu aplikasi permohonan izin tinggal *online* yang terkoneksi pada SIMKIM tersebut, dapat memperpanjang izin tinggal Orang Asing secara *by online* tanpa dibatasi waktu dan

datanya sendiri sesuai nama dan nomor paspor, lalu terbit tanggal penerbitan permohonan. Tidak memerlukan mengisi form yang ada di SIMKIM Versi 1.0, hanya saja yang perlu diperhatikan pada saat mencetak hasil pendaftaran *online* dan membawa langsung ke Kantor Imigrasi untuk diberikan bukti pembayaran bank. Dalam perkembangannya SIMKIM Versi 2.0 ini khususnya aplikasi izin tinggal *online* terus dilakukan penyempurnaan dalam rangka untuk memangkas birokrasi dan mengurangi layanan tata muka apalagi pada masa pandemic yang melanda Indonesia.

Kendala SIMKIM Versi 2.0

No.	Klasifikasi Kendala SIMKIM Versi 2.0 Izin Tinggal Keimigrasian	Penjelasan
1.	Perangkat Keras (Hardware)	Pengambilan biometrik sidik jari pada bayi dibawah 3 (tiga) tahun sering mengalami kendala tidak terbaca dan tidak dapat dilakukan <i>skip</i> pengambilan sidik jari sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan. Pencetakan kartu Faskim (Fasilitas Keimigrasian) untuk anak ABG (Anak Berkebangsaan Ganda) harus dilakukan berulang karena hasil pencetakan kurang jelas, pekerjaan kartu tersebut dilakukan berulang kali. Proses pencetakan E-Kitap, kartu tertarik pada mesin cetak namun tidak teretak pada kartu sehingga kartu yang keluar masih kosong. Bentuk penyajian laporan agar dapat disederhanakan.
2.	Perangkat Lunak (Software)	Penarikan data tidak dapat diklasifikasikan secara terperinci menurut kewarganegaraan, jenis izin tinggal, tujuan kedatangan, jenis kelamin, bidang pekerjaan, dan domisili tempat tinggal. Data pemegang izin tinggal tetap yang masih tersimpan di SIMKIM Versi 1.0 belum semua diintegrasikan ke SIMKIM Versi 2.0 untuk memudahkan dalam proses pencarian data. QR code pada Kitas <i>online</i> dan billing pembayaran tidak dapat diakses menggunakan perangkat peminda. Penginapan permohonan menggunakan Niora tidak terupdate domisili pemohon yang bersangkutan sehingga harus diedit melalui perawatan data. Pada beberapa kasus status permohonan telah selesai namun tidak terupdate pada laporan buku register. Penerbitan Kitas <i>online</i> yang memiliki <i>barcode</i> , tetapi untuk memindai <i>barcode</i> tersebut belum ada sistemnya.
3.	Sumber Daya Manusia (Brainware)	Masih kurangnya jumlah pegawai yang berlatar belakang keahlian teknologi informasi di Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi dan di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.
4.	Sistem Jaringan Komputer (Network)	Sering terjadi koneksi BMS yang bermasalah khususnya pada jam pelayanan.
5.	Database	Konektivitas server Direktorat SISTIK (Sistem dan Teknologi Informasi Manajemen) dengan server SIMPONI (Sistem Informasi PNPB <i>Online</i>) Direktorat Keuangan.

Dari penjabaran kendala terkait SIMKIM Versi 2.0 terhadap penerbitan izin tinggal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa disemua sistem pasti terdapat kelemahan, apalagi pada SIMKIM Versi 2.0 ada beberapa fitur masih dalam tahap pengembangan di SISTIK pusat. SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh fungsi

pengimplementasiannya masih terdapat beragam kendala.

Khususnya pada Seksi Intaltuskim (Izin Tinggal dan Status Keimigrasian) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam proses penerbitan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing menggunakan SIMKIM Versi 2.0 terbaru mengalami hambatan yang ditemui yakni proses penerbitan billing pembayaran terhambat, konektivitas server Direktorat SISTIK (Sistem dan Teknologi Informasi Manajemen) dengan server SIMPONI (Sistem Informasi PNPB Online) Direktorat Keuangan dan bentuk penyajian laporan agar dapat disederhanakan. Proses pemilahan untuk laporan diperbanyak mulai dari fitur, kategori, berdasarkan penjamin, berdasarkan wilayah, beserta pilihan untuk memudahkan pegawai sebagai user yang secara langsung menjalankan sistem tersebut.

Di samping itu, kendala aplikasi SIMKIM Versi 2.0 secara garis besar dirasakan juga di semua UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kantor Imigrasi diseluruh Nusantara yang telah mengoperasikan SIMKIM dalam hal pelayanan Keimigrasian. Banyaknya aplikasi ditemukan pada saat berlangsung, sistem yang terdistribusi cukup menyulitkan saat proses *update* aplikasi dijalankan. Sebagai contoh nyata, ketika penggunaan SIMKIM menghadapi kendala banyaknya lokasi yang harus diperbaharui tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang berlatar belakang keahlian teknologi informasi di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Selain permasalahan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran dan penentuan kebijakan pimpinan akan mempengaruhi arah proses pengembangan SIMKIM kedepannya.

Kemudian penulis juga mewawancarai Bapak Alim Ahsan yang merupakan staf pelaksana di Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, beliau juga mengatakan bahwa *helpdesk* merupakan salah satu cara guna merespon masalah terkait kesisteman.

“*Helpdesk* dalam konteks IT (*Information Technology*) bertanggung jawab untuk menjawab berbagai pertanyaan dari penggunaannya terkait hal teknis. Secara tidak langsung, tugas dari IT *helpdesk* tidak jauh berbeda dengan *customer service*. Sebagian besar perusahaan IT, termasuk Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) telah menyiapkan *helpdesk* untuk menjawab beragam pertanyaan yang datang dari user pegawai di Kantor Imigrasi yang mengalami kendala. Biasanya, langsung dapat melakukan pertanyaan ke *helpdesk* melalui email, telepon, situs *website*, atau bahkan *online chatting*.”

Pihak Imigrasi ketika menemui kendala terkait SIMKIM Versi 2.0 ini, pada kesempatan pertama memberitahukan konfirmasi kepada atasan langsung, lalu atasan berkoordinasi ke pusat dalam hal ini SISTIK untuk mencari jalan keluar dan itu terfasilitasi oleh fasilitas *helpdesk*. Jadi semua permasalahan terkait SIMKIM Versi 2.0 baik paspor maupun izin tinggal, ketika menemui kendala dimasukan di *helpdesk* dan petugas SISTIK cepat merespon untuk setiap permasalahan.

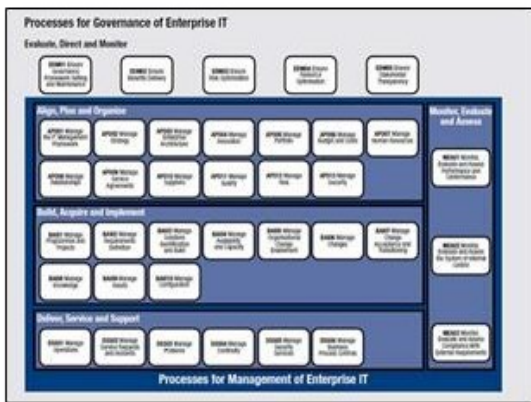
Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Metode Cobit 5 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) 5* dengan alasan sebagai suatu aturan dalam tata kelola teknologi informasi dimana didalamnya memanfaatkan manajemen, layanan teknologi informasi, pengawasan, audit,

pengukuran teknologi informasi khususnya pada tata kelola teknologi informasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar.

Adapun model domain utama pada *framework* Cobit 5 terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. EDM (Evaluate, Direct, and Monitor)
2. APO (Align, Plan, and Organise)
3. BAI (Build, Acquire and Implement)
4. DSS (Deliver, Service and Support)
5. MEA (Monitor, Evaluate and Assess)



Gambar Domain Cobit 5



Gambar Prinsip COBIT 5

ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*) melalui *framework* COBIT 5 memiliki 5 (lima) prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi dalam

sebuah organisasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Meeting stakeholder needs*

Setiap penyelenggara kebijakan organisasi mempunyai kepentingan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteks yang berbeda. Ada yang menginginkan terjadinya

efisiensi, meningkatnya revenue, keterbukaan akan pengelolaan aset, membenahi control process, meningkatkan kualitas pegawai, dan memberdayakan sumber daya manusia, semua ini merupakan prinsip utama governance dimana kehadiran sistem dan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari konteks tujuan dan target pemangku kebijakan dalam organisasi.

2. *Covering the enterprise end-to-end*

Data sebagai substansi penting organisasi yang diperlukan oleh semua unit organisasi, mulai dari pemasok bahan baku hingga pelanggan. Setiap aktivitas dalam organisasi membutuhkan data, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan data baru untuk kebutuhan proses berikutnya. Oleh sebab itu maka domain governance perlu memfokuskan pada kenyataan ini sehingga pendekatan yang dilakukan utuh dan lengkap disemua lini organisasi.

3. *Applying a single integrated framework*

Saat ini ada begitu banyak standar best practice di bidang manajemen dan governance teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi. Dalam situasi ini, Cobit telah menerapkan berbagai sistem dan ide terbaik ke dalam prinsip, model, dan strukturnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Cobit telah terintegrasi dalam mengoordinasikan secara keseluruhan.

4. *Enabling a holistic approach*
 Masalah governance tidak bisa terpisahkan, dalam artian tidak hanya melihatnya dari sisi perspektif saja. Governance adalah suatu bentuk aturan yang berhubungan dengan berbagai dimensi seperti kebijakan, sistem, sumber daya, prasarana, dan inovasi teknologi. Setiap domain ini dapat menjadi pemicu (enabler) untuk pelaksanaan praktek governance yang layak bergantung dari keadaan konteks dalam organisasi.
5. *Separating governance from management*
 Perbedaan mendasar antara manajemen yang menekankan pada suatu aktivitas kegiatan demi mencapai visi misi organisasi yang telah dicanangkan, sedangkan governance lebih menekankan pada upaya untuk pencapaian sasaran yang sesuai dengan prinsip nilai (value) dari pemilik perusahaan seperti transparansi, tanggung jawab dan responsibilitas.

Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Level)

Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola teknologi informasi suatu organisasi seperti tingkat kematangan (*maturity level*), model kapabilitas proses (*capability process model*), dan analisis kesenjangan (*gap analysis*). Namun pada Kantor Imigrasi Imigrasi Kelas I TPI Makassar, menggunakan Cobit 5 domain MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*) model tingkat kematangan (*maturity level*).

Tabel Maturity Level

Maturity Index	Maturity Level
0.00-0.50	Nilai 0 <i>incomplete process</i> (Proses Gagal)
0.51-1.50	Nilai 1 <i>performed process</i> (Proses Dijalankan)
1.51-2.50	Nilai 2 <i>managed process</i> (Proses Diatur)
2.51-3.50	Nilai 3 <i>established process</i> (Proses Tetap)
3.51-4.50	Nilai 4 <i>predictable process</i> (Proses Di Ukur)
4.51-5.00	Nilai 5 <i>optimising process</i> (Proses Optimasi)

Teknik analisis memakai rumus statistika yang berpatokan dari Modul PAM (*Proses Model Assessment*) untuk menjumlahkan nilai *maturity level* pada variabel domain MEA yaitu: MEA01, MEA02, dan MEA03. Adapun perhitungan agar mendapatkan nilai dari setiap level untuk variabel adalah dengan cara mencari rata-rata keseluruhan. Rumus statistika yang digunakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Kematangan Atribut} &= \frac{\sum (\text{Total Jawaban} \times \text{Bobot})}{\text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\
 \text{Indeks Kematangan} &= \frac{\sum (\text{Indeks Kematangan Atribut})}{\sum \text{Aktivitas}}
 \end{aligned}$$

Tabel Sasaran Responden Kuesioner Tata Kelola Teknologi Informasi

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	1
4.	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	1
5.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	1
6.	Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi	1
7.	Kepala Urusan Keuangan	1
8.	Kepala Urusan Umum	1
9.	Staf Pelaksana	3
Total		11

Hasil Tata Kelola Teknologi Informasi

Hasil analisis tata kelola teknologi informasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, menggunakan COBIT 5 *maturity level* domain MEA (*Monitor, Evaluate, and Assess*) sebagai instrumen dalam menjawab tanggapan dari responden.

Tabel Hasil Perhitungan Maturity Level Domain MEA01

Responden	Bobot Nilai						Total Bobot Nilai
	0	1	2	3	4	5	
01	0	0	4	21	7	-	99
02	-	-	-	6	16	10	132
03	-	-	-	-	16	16	144
04	-	-	-	12	20	-	116
05	-	-	-	2	11	19	145
06	-	-	1	16	15	-	110
07	-	-	2	3	21	6	127
08	-	-	-	-	32	-	128
09	-	-	-	-	32	-	128
10	-	-	-	3	23	6	131
11	-	-	10	12	10	-	96
Total							1356
Indeks							3.85

Tabel Hasil Perhitungan Maturity Level Domain MEA02

Responden	Bobot Nilai						Total Bobot Nilai
	0	1	2	3	4	5	
01	0	0	4	21	7	-	99
02	-	-	-	6	16	10	132
03	-	-	-	-	16	16	144
04	-	-	-	12	20	-	116
05	-	-	-	2	11	19	145
06	-	-	1	16	15	-	110
07	-	-	2	3	21	6	127
08	-	-	-	-	32	-	128
09	-	-	-	-	32	-	128
10	-	-	-	3	23	6	131
11	-	-	10	12	10	-	96
Total							1356
Indeks							3.85

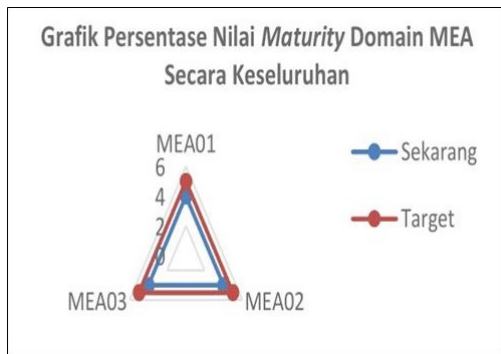
Tabel Hasil Perhitungan Maturity Level Domain MEA03

Responden	Bobot Nilai						Total Bobot Nilai
	0	1	2	3	4	5	
01	-	-	-	4	21	2	106
02	-	-	-	2	19	6	112
03	-	-	-	-	14	13	113
04	-	-	-	5	22	-	103
05	-	-	-	-	13	14	122
06	-	-	1	19	11	-	91
07	-	-	-	2	25	-	100
08	-	-	-	3	24	-	105
09	-	-	-	2	25	-	100
10	-	-	-	2	24	1	107
11	-	-	-	4	23	-	104
Total							1175
Indeks							3.98

Tabel Rekapitulasi Keseluruhan Domain MEA

Domain	Indeks	Level	Keterangan
MEA01	3.85	4	<i>Predictable Process</i>
MEA02	3.85	4	<i>Predictable Process</i>
MEA03	3.95	4	<i>Predictable Process</i>
AVG Maturity Level	3.88	4	<i>Predictable Process</i>

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden, telah diperoleh nilai tingkat kematangan *maturity level* nilai tingkat kematangan *maturity level* domain MEA yakni 3.88 pada level 4 *predictable process* (proses di ukur) dengan penjelasan prosedur yang dijalankan telah beroperasi dalam batas yang ditetapkan dalam mencapai hasil target. Nilai tertinggi terdapat pada domain MEA03 yakni 3.95 sedangkan nilai terendah pada domain MEA01 dan MEA02 yakni 3.85. Pada domain ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar selaku organisasi sudah melakukan implementasi pengukuran tata kelola teknologi informasi dalam mencapai target yang diharapkan.



Gambar Grafik Nilai Maturity Domain MEA

Untuk gambar grafik tingkat kematangan nilai *maturity* domain MEA telah ditemukan penjelasan yakni keterangan garis berwarna biru merupakan tingkat kematangan keadaan sekarang, sedangkan garis berwarna merah memberitahukan keterangan tingkat kematangan target sebuah organisasi. Sebagai hasil kesimpulan terkait analisis tingkat kematangan domain MEA, diperoleh nilai sebesar 3.88 pada tingkat kematangan 4 dengan keterangan *predictable process* (proses diukur).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan beberapa hasil kesimpulan yang terarah dan dianggap telah berhasil mencapai tujuan penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Untuk menjawab rumusan masalah ke satu terkait implementasi SIMKIM Versi 2.0 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar dalam penerbitan izin tinggal Orang Asing. Penelitian telah memberikan penjelasan dan fakta bahwa SIMKIM Versi 2.0 yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis saat ini, dalam hal proses penerbitan izin tinggal Orang Asing masih ditemukan berbagai kendala baik dari kesisteman maupun secara fasilitas. Hal tersebut dikarenakan faktor kebijakan pimpinan, anggaran yang memadai dan petugas Imigrasi

sebagai sumber daya manusia pelaksana sistem tersebut. Namun dengan hadirnya SIMKIM yang mengalami perkembangan bermula Versi 1.0 menjadi Versi 2.0 memberikan dampak pada Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal pengoptimalan pelayanan dan fungsi Keimigrasian.

2. Untuk menjawab rumusan masalah ke dua terkait implementasi tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan metode Cobit 5 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar. Dari hasil analisis terkait tata kelola teknologi informasi menggunakan COBIT 5 domain MEA (*Monitor, Evaluate and Assess*) dengan menghitung tingkat kematangan *maturity level*, diperoleh hasil nilai sebesar 3.88 berada pada tingkat kematangan 4 (*predictable process*) yang bermakna proses dalam organisasi telah ditetapkan untuk mencapai target yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran guna mendukung proses penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam menentukan dan melaksanakan sebuah kebijakan dengan misi untuk pengembangan sistem SIMKIM, diperlukan perencanaan yang matang dengan memperhatikan tata kelola sehingga keberadaannya berguna untuk semua pihak dan pemanfaatannya tepat sasaran sesuai dengan cita-cita pelayanan prima Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sebagai bahan masukan dan langkah yang dapat ditempuh pihak Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terkait pengembangan SIMKIM yang patut terus dilaksanakan, mengingat perkembangan teknologi makin maju setiap waktunya (*up to date*). SIMKIM kedepannya diharapkan menjelma sebagai sistem yang mampu menyempurnakan kinerja tugas dan fungsi Keimigrasian. 20

3. Bagi pembaca dapat menambah pemahaman terkait SIMKIM dalam pengoperasiannya di Unit Pelaksana Teknis yang menguraikan kesisteman dalam rangka peningkatan pelayanan Keimigrasian khususnya pada pelayanan izin tinggal. Mengingat di zaman pandemic ini memaksa kita untuk belajar dan mengembangkan penggunaan teknologi agar dengan adanya bantuan teknologi ini dapat memberikan kemudahan di bidang pelayanan Keimigrasian dengan lebih memperhatikan security keamanan data dari ancaman ciber crime.
4. Bagi peneliti berikutnya dapat melakukan pengembangan penelitian serupa yang membahas lebih lanjut terkait analisis implementasi SIMKIM Versi 2.0 dalam penerbitan izin tinggal dalam rangka mencapai pelayanan prima dan lebih memperhatikan tata kelola sistem informasi manajemen.
- DAFTAR PUSTAKA**
- [1] daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya Impact of Information Technology Development and Communication on," *J. Pendidik.*, vol. X, no. 2, pp. 195–211, 2017.
- [2] Haryati, "Katalog Dalam Terbitan Prosiding Seminar Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Meningkatkan Nilai Tambah Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Editor Haryati Penata Letak & Desain Cover One Indraretnani," *Balai Pengkaj. dan Pengemb. Komun. dan Inform. Bandung Badan Litbang SDM Kementerian. Komun. dan Inform. RI* Pengembangan Komun. dan Inform. Bandung Badan Litbang SDM Kementerian. Komun. dan Inform. RI, no. 1, 2012.
- [3] B. J. Kaleb, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dan Pengawasannya Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 781–790, 2019, doi: 10.35794/emba.v7i1.22555.
- [4] D. Rahmawati, Atma, Lia, Hariani, "Analisis Penerapan E-Government Pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Semarang," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [5] A. Hoeran, "Bab I Pendahuluan أذ ي أ ذ," *Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekor. Pada Busana Modestwear*, vol. d, no. 2017, pp. 1–15, 2017.
- [6] J. P. Sande, "Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa," *Indones. Perspect.*, vol. 5, no. 1, pp. 92–111, 2020, doi: 10.14710/ip.v5i1.30196.
- [7] U. Rusilowati, "Analisis manajemen pengetahuan berbasis teknologi informasi: studi kasus pada Lemlitbang Pemerintah pengambil kebijakan," *J. Organ. dan Manaj.*, vol. 11, no. 1, pp. 44–61, 2015.
- [8] P. Publik and P. R. Indonesia, "UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik", " *UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang "Pelayanan Publik"*, 2009.
- [9] H. Budiman, "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Al-Tadzkiyyah J. Pendidik. Islam*, vol. 8, no. 1, p. 31, 2017, doi: 10.24042/atjpi.v8i1.2095.
- [10] B. Warsita, "Landasan Teori dan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Teknologi Pembelajaran," *J. Teknodik*, vol. 15, no. 1, pp. 84–96, 2011, [Online]. Available: <http://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/Teknodik/article/view/64>.
- [11] P. H. Parsaorantua, Y. Pasoreh, and S. A. Rondonuwu, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Acta Diurna*, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.

- [12] R. Tomy Miftah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa Pendidikan Ips Universitas Negeri Yogyakarta," *Univ. Negeri Yogyakarta*, pp. 12–40, 2014.
- [13] I. Irawati, S. Salju, and H. Hapid, "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt. Telkom Kota Palopo," *J. Manaj. STIE Muhammadiyah Palopo*, vol. 3, no. 2, pp. 6–12, 2019, doi: 10.35906/jm001.v3i2.302.
- [14] P. E. Sudjiman and L. S. Sudjiman, "Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan," *TeIKa*, vol. 8, no. 2, pp. 55–66, 2020, doi: 10.36342/teika.v8i2.2327.
- [15] D. D. Hidayah, "KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)," *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 7, no. 1, pp. 28–34, 2020.
- [16] Freeman, "BAB II Pelayanan Publik," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [17] R. C. Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *FIAT JUSTISIA Jurnal Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 3, pp. 569–586, 2017, doi: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.794.
- [18] M. H. Pratama, "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Deskriptif tentang Strategi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor)," *J. Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 3, no. 3, pp. 90–98, 2015.
- [19] F. W. Sari, "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN SUKARELA (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2008 – 2011)," *Uajy*, pp. 7–30, 2012, [Online]. Available: <http://e-journal.uajy.ac.id/406/3/2EA17195.pdf>.
- [20] A. Prasetyo, "Mengkaji Aspek Hukum Dan Kesesuaian Tahapan E-Government Terhadap Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian," *Academia.Edu*, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/60681000/Mengkaji_Aspek_Hukum_SIMKIM20190923-79563-leso9q.pdf.
- [21] J. I. Hukum, P. Universitas, S. Kuala, G. Ginting, F. A. Rani, and D. Ali, "Keimigrasian," vol. 2, no. 4, pp. 62–68, 2014.
- [22] H. PRANATA, "Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian," 2014, [Online]. Available: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1602/1/SKRIPSII353-1801113724.pdf>.
- [23] E. A. Sosiawan, "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia," *Semin. Nas. Inform.*, vol. 2008, no. semnasIF, pp. 99–108, 2008.
- [24] Nasrullah, "Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance dan Smart City (Studi Kasus: Pemerintah Kota Makassar)," *JUSITI J. Sist. Inf. dan Teknol. Inf.*, vol. 6, no. 2, pp. 23–31, 2018.
- [25] B. Y. Wijaya, "Analisis Strategi Komunikasi Dalam E-Government Di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara," 2019, [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14117>.
- [26] J. T. Nugraha, "E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman)," *J. Komun. Dan Kaji. Media*, vol. 2, no. 1, pp. 32–42, 2018.

- [27] I. Jaya, *Audit Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Perguruan Tinggi Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 5*. 2018.
- [28] M. Maskur, N. Adolong, and R. Mokodongan, "Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Framework Cobit 5 Di Bpmpst Bone Bolango," *Masy. Telemat. Dan Inf. J. Penelit. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 8, no. 2, p. 109, 2018, doi: 10.17933/mti.v8i2.106.
- [29] I. E. Kaban, "Tata kelola teknologi informasi • (," *CommIT*, vol. 3, no. C, pp. 1–5, 2009.
- [30] C. T. dan Arisman, *Pengembangan Sistem Informasi Keimigrasian*. 2020.
- [31] Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia," no. 1473, pp. 1–424, 2015.
- [32] S. Purwaningsih, "Analisis Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) Online (Studi Pada PT Jamsostek (PERSERO))," *Aset*, vol. 12, no. 2, pp. 181–189, 2010.
- [33] Yohanes et.al, "The Implementation Strategy of Information Technology," *J. Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*, pp. 1–22, 2013.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

